

KEGIATAN KAPAL KEAGENAN PT. SRIJAYA SEGARA UTAMA DALAM PROSES *PORT CLEARANCE* UNTUK PERCEPATAN KEGIATAN BONGKAR PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Sungkono Ali, Fandry H Sipahutar

Abstrak

Dalam mengoperasikan kapal terdapat permasalahan yaitu pada proses kegiatan/aktivitas penanganan masuk dan keluar kapal dalam pelaksanaannya banyak ditemui hambatan-hambatan tersebut berupa dokumen atau sertifikat kapal tersebut. hambatan-hambatan tersebut berupa dokumen atau sertifikat kapal yang sudah habis masa berlakunya, informasi kedatangan kapal yang kurang akurat di terima oleh agen pelayaran mengakibatkan penetapan PPKB (Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang) menjadi terlambat dan belum tersedianya fasilitas dermaga untuk tempat sandar kapal karena masih di tempati oleh kapal lain. Ketiga hal tersebut apabila tidak cepat-cepat di tangani, maka akan menghambat kelancaran operasional kapal selama di pelabuhan. Sebaiknya dengan mengatur perencanaan kedatangan kapal atau sandar kapal dengan baik yang dibuat oleh PT. Srijaya Segara Utama harus disesuaikan lagi dengan adanya rapat koordinasi kapal untuk mengetahui dan merencanakan akan melakukan pembongkaran muatan kapan dan dimana kapal akan sandar, agar tidak terjadinya keterlambatan kapal.

Kata kunci : Kegiatan kapal, *Port clearance*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia di kenal sebagai negara maritim yang sebagian besar luas wilayahnya adalah perairan, serta pulau-pulau yang terletak pada posisi jalur perdagangan dunia. Oleh sebab itu peranan transportasi laut sangat penting disamping sebagai penghubung dan alat transportasi juga berperan sebagai ketahanan suatu negara. Angkutan kapal laut merupakan usaha perusahaan pelayaran niaga yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa angkutan laut untuk memajukan perdagangan dalam dan luar negeri. Salah satu contoh adalah

Sungkono Ali	<i>Fandry H Sipahutar</i>
<i>Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Prodi DIII Transportasi Fak. Teknik Universitas Negeri Jakarta</i>	<i>Mahasiswa Prodi DIII Transportasi Fak. Teknik Universitas Negeri Jakarta</i>

pengiriman barang baik produk barang mentah maupun barang jadi ke negara lain yang akan dapat menambah pemasukan devisa negara. Pada dasarnya pembangumam ekonomi selalu diusahakan agar dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bagi suatu Negara kemajuan pembangunan ekonomi ini ditandai dengan pertumbuhan yang tinggi diberbagai sektor ekonomi yang ada seperti sektor industri yang menghasilkan barang dan jasa, serta sektor perdagangan yang melakukan distribusinya.

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka sektor-sektor tersebut membutuhkan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung, agar sub sektor dalam perekonomian mampu berinteraksi secara baik dalam arti bahwa barang dan jasa yang dihasilkan sektor industri secepatnya di salurkan pada konsumen. Sarana dan prasarana pengangkutan laut adalah pelabuhan, kapal, dan petugas (Instansi Pemerintah) yang di tunjuk sebagai perwakilan atau di kenal dengan keagenan. Kebanyakan sarana dan prasarana pengangkutan laut memungkinkan kegiatan usaha pengangkutan dapat berjalan dengan baik. Kapal yang merupakan alat penghubung di laut yang telah di kenal oleh masyarakat pada umumnya.

Dalam mengoprasikan kapal terdapat permasalahan yaitu pada proses kegiatan/aktivitas penanganan masuk dan keluar kapal dalam pelaksanaannya banyak ditemui hambatan-hambatan tersebut berupa dokumen atau sertifikat kapal tersebut. Hambatan-hambatan tersebut berupa dokumen atau sertifikat kapal yang sudah habis masa berlakunya, informasi kedatangan kapal yang kurang akurat di terima oleh agen pelayaran mengakibatkan penetapan PPKB (Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang) menjadi terlambat dan belum tersedianya fasilitas dermaga untuk tempat sandar kapal karena masih di tempati oleh kapal lain. Ketiga hal tersebut apabila tidak cepat-cepat di tangani, maka akan menghambat kelancaran operasional kapal selama di Pelabuhan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan, maka penelitian dtitikberatkan pada beberapa permasalahan yang menyebabkan kegiatan kapal keagenan dalam proses port clearance berpengaruh terhadap percepatan kegiatan bongkar muat.

METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan ini menggunakan metode penelitian dengan cara observasi dan wawancara yaitu, Seberapa besar hubungan dan pengaruh kegiatan kapal keagenan dalam proses port clearance terhadap percepatan kegiatan bongkar muat. Untuk mengetahui dengan tepat bagaimana Kegiatan kapal Keagenan PT. Srijaya Segara Utama dalam proses clearance di Tanjung priok. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh proses clearance oleh PT. Srijaya Segara Utama terhadap percepatan bongkar muat di pelabuhan tanjung priok. Lokasi penelitian atau wilayah studi dan pengambilan data hanya pada lingkup PT. Srijaya Segara Utama dengan waktu penelitian Januari – Februari. Teknik untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui pengalaman saya selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Dalam hal ini penulis menggunakan metode kepustakaan, metode wawancara, metode observasi lapangan dan metode kuesioner dalam penyusunan tugas akhir ini. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kepustakaan, metode wawancara, metode observasi lapangan dan metode kuesioner dalam penyusunan tugas akhir ini.

PEMBAHASAN

Kegiatan *Port clearance* ini memiliki hambatan saat kapal ingin masuk ke pelabuhan. hambatan tersebut antara lain:

Dalam melakukan pekerjaan tidak jarang kita menghadapi kesulitan dan hambatan tertentu tetapi tidak menutupi kemungkinan kita kalau dapat dengan mudah menyelesaikannya. Demikian juga yang dirasakan oleh bagian operasi perusahaan PT. Srijaya Segara Utama dalam pengurusan administrasi penyandaran dan keberangkatan kapal-kapal keagenan. Hambatan-hambatan tersebut kadang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri maupun dari luar. Adapun hambatan-hambatan yang biasanya dihadapi selama pengurusan administrasi penyandaran dan keberangkatan kapal adalah sebagai berikut :

1. Kerja sama yang kurang ke bagian operasional

Sebagai akibat dari struktur organisasi yang diterapkan mengakibatkan kurang kerja sama antar bagian operasi dengan bagian lainnya dengan mempengaruhi gerak bagian operasi dalam perusahaan administrasi penyandaran dan pemberangkatan kapal. Hal ini menimbulkan

keterlambatan kapal mendapat pelayanan di pelabuhan, misalnya penetapan kade untuk kapal sandar.

2. Penyediaan Dokumen Terlambat

Setiap kapal yang akan masuk/keluar ke atau dari suatu pelabuhan tentu harus melengkapi dokumen-dokumen yang dimilikinya. Dokumen tersebut harus diajukan ke instansi terkait dan merupakan persyaratan administrasi penyandaran kapal. Pada kenyataan dokumen yang diperlukan tidak komplis sehingga menyulitkan bagian operasi dalam pengurusan ijin masuk ke pejabat yang berwenang di pelabuhan.

3. Kelambatan Alat Transportasi Darat

Dengan melaksanakan pembongkaran muatan melalui *truck losing*, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama di pelabuhan karena jumlah truk/tangki truk yang menampung muatan dari kapal terbatas sehingga harus menunggu kedatangannya kembali untuk melakukan pemuatan berikutnya.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Didalam mengerjakan pekerjaan adalah mutlak membutuhkan sumber daya yang handal sesuai dengan bidangnya masing-masing. Keterbatasan sumberdaya didalam perusahaan ini mengakibatkan adanya penanganan beberapa pekerjaan oleh satu orang sehingga tidak jarang menyelesaikan pekerjaan yang tidak tuntas. Hal ini mengakibatkan penyimpanan file-file kurang terorganisasi dengan baik hingga dapat mengganggu operasi perusahaan secara umum.

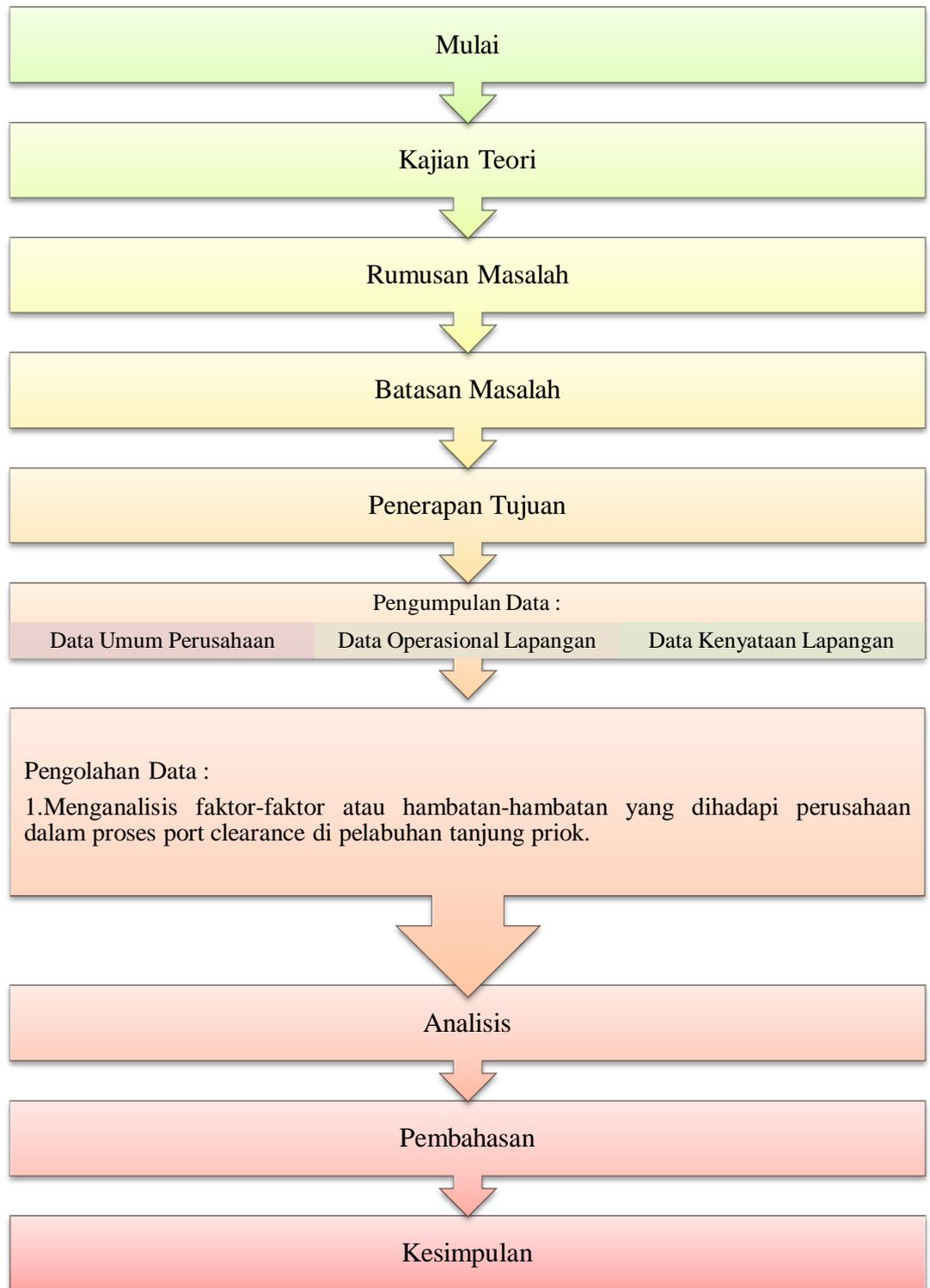
5. Hambatan karena keterlambatan berita mengenai kedatangan kapal sehingga bagian operasi sangat sulit untuk menentukan penyandarannya.

6. Adanya permasalahan dengan instansi terkait karena dokumen yang diserahkan belum lengkap, permasalahannya seperti :

- a. karantina : 1. Dikapal terdapat penyakit menular
2. adanya pemeriksaan tumbuhan
- b. imigrasi : 1. Paspor awak kapal yang kadaluarsa
2. adanya penumpang gelap
- c. bea cukai : 1. Dokumen muatan yang dimuat tidak lengkap
2. terdapat barang2 yang tidak didukung dokumen
(selundupan)

d. syahbandar : 1. Sertifikat2 kapal habis masa berlakunya

ALUR PENELITIAN



KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kegiatan kapal keagenan dalam proses *port clearance* sangat mempengaruhi kegiatan bongkar muat.

1. Tingkat kecepatan dan ketepatan agen pelayaran dalam melayani kebutuhan kapal sangatlah dipengaruhi oleh faktor lingkungan, oleh sebab itu koordinasi dan kerjasama secara intern dalam perusahaan pelayaran itu sendiri maupun dengan instansi terkait harus terjalin dengan baik sehingga mutu pelayanan yang diberikan oleh agen pelayaran dapat memuaskan para pemakai jasa keagenan.
2. Dalam pelaksanaan pelayanan jasa keagenan dalam hal penanganan *Clearance In*, pengurusan kebutuhan kapal dan awak kapal, *Clearance Out* dan pemberangkatan kapal harus dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku serta yang lazim dilakukan oleh agen pelayaran.

SARAN

Dalam hal ini penulis akan memberikan saran-saran, semoga dapat bermanfaat bagi pengelola PT. Srijaya Segara Utama serta pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut :

1. Perusahaan pelayaran harus lebih meningkatkan hubungan yang baik dengan instansi terkait di pelabuhan baik instansi pemerintah maupun swasta.
2. Salah satu tugas dari agen pelayaran adalah menangani kedatangan dan keberangkatan kapal, maka bagian operasional hendaknya orang yang terampil dalam bidang operasional tersebut.
3. Kesejahteraan karyawan harus diperhatikan agar mereka dapat bekerja dengan lebih bersemangat sehingga hasil kerja yang dicapai juga dapat semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, 1993, Manajemen Transportasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,)
- Buku Pedoman PT. Srijaya Segara Utama: ISO 9001: 2008, 2014
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, Jakarta.
- PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II, 2006, Direktori Pelabuhan Tanjung Priok Edisi 2006. Jakarta : PT. Pro Fajar
- Sudjatmiko, FDC, 2004, Pokok-Pokok Pelayaran Niaga, Edisi 3 Rvs, 2006, Jakarta: CV. Satyo Wijaya
- Suyono, R.P, SHIPPING, 2005, Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut (seri bisnis internasional no.6), Jakarta : PPM
- Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran